



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI
PERKOTAAN (PNPM-MP) PROGRAM PINJAMAN
BERGULIR DI KELURAHAN SIWALAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

**Ines Ayu Fandari Putri
7450408084**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : *Jumat*

Tanggal : *28 Agustus 2015*

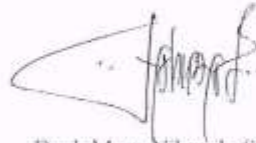
Menyetujui

Pembimbing I



Lesta Karolina br Sebayang, S.E., M.Si
NIP. 198007172008012016

Pembimbing II



Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si
NIP. 197705022008122001

Mengetahui,

Kapal Jurusan Ekonomi Pembangunan



Lesta Karolina br Sebayang, S.E., M.Si
NIP. 198007172008012016

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Jum'at*

Tanggal : *25 September 2015*

Penguji I

Deky Aji Saseno, S.E., M.Si
NIP 197612032003121004

Penguji II

Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si
NIP 19800717200812016

Penguji III

Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si
NIP 197705022008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



[Signature]
Drs. Arief Yono, M.M
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Program Pinjaman Bergilir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang" dan seluruh isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Skripsi ini bebas plagiat, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, September 2015

Yang Membuat Pernyataan,



Ines Ayu Fandari Putri
NIM. 7450408084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah : 5)
- Hal yang mudah akan terasa sulit jika yang pertama dipikirkan adalah kata sulit. Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan kekuatan. (Fariz Hussein)
- Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita terjatuh (Agung Tri Purnomo).

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orangtua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan
2. Adikku, Danes Ismail Lazuardi
3. Teman-teman seperjuangan EP angkatan 2008

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya, sehingga skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata 1 di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ijin dan kemudahan administrasi dalam melaksanakan penelitian.
3. Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si., Ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Dosen Pembimbing I Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Deky Aji Suseno, S.E., M.Si., Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis.

5. Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis.
6. Ibu Mundiari Dewi, Fasilitator bidang Ekonomi yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Anggota KSM Kelurahan Siwalan yang telah bersedia sebagai informan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Lisa Safitri, Irwan Wahyudi, Ragil Kristiawan, Dwi Setiawan, Olik, Timtim, Novi, Rifki yang setia memberikan dukungan semangatnya.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Semarang, September 2015

Penulis

SARI

Putri, Ines Ayu Fandari, 2015. “*Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*”. Skripsi. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I oleh Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si dan Pembimbing II oleh Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Evaluasi, Pinjaman, Dana Bergulir, PNPM Mandiri Perkotaan.

Penelitian ini adalah tentang pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dana pinjaman bergulir yang diberikan meningkatkan usaha, jumlah produk, dan kelancaran usaha yang akhirnya dapat menurunkan kemiskinan. Namun, data warga miskin di Kelurahan Siwalan tahun 2011-2013 jumlah warga miskinnya malah naik sehingga perlu diteliti kembali apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) mempunyai pengaruh pada variabel-variabel penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data statistik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Subjek yang akan diteliti adalah Masyarakat yang mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pinjaman bergulir yang diberikan pada Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari telah tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan : a) Terjadi peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Sebelum adanya pinjaman bergulir peningkatan jumlah produksi usaha lebih kecil namun sesudah adanya pinjaman dana bergulir peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM menjadi meningkat. Hal ini berarti peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM lebih besar setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir dibandingkan dengan sebelum adanya pinjaman dana bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi yang semakin meningkat dan kelancaran usaha yang sangat disukai oleh anggota KSM. b) Terdapat peningkatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Terdapat perbedaan yang cukup besar peningkatan usaha sebelum dan sesudah adanya pinjaman bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan usaha dan kelancaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir. c) Terdapat kelancaran usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Kelancaran usaha sebelum adanya pinjaman dana bergulir lebih sedikit dibandingkan dengan kelancaran usaha sesudah adanya pinjaman dana bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah peralatan yang dimiliki KSM.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kemiskinan	12
2.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	16
2.3 Penanggulangan Kemiskinan	19

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	
Perkotaan (PNPM-MP)	21
2.4.1 Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan	21
2.4.2 Dasar Hukum PNPM Mandiri Perkotaan	22
2.4.3 Visi dan Misi Mandiri Perkotaan	22
2.4.4 Tujuan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)	23
2.4.5 Sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)	24
2.5 Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan	24
2.5.1 Latar Belakang dan tujuan Pinjaman Bergulir	24
2.5.2 Sasaran, Pendekatan, Prinsip, dan Strategi Pinjaman Bergulir	27
2.6 Pemberdayaan Masyarakat	32
2.6.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	34
2.6.2 Langkah Pemberdayaan Masyarakat	34
2.7 Evaluasi Program	35
2.7.1 Konsep Dasar Evaluasi Program	36
2.7.2 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Program	36
2.10 Penelitian Terdahulu	37
2.11 Kerangka Pemikiran Teoritis	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Obyek dan Subjek Penelitian	44
3.3 Populasi	44
3.4 Sampel	45
3.5 Variabel Penelitian	47
3.6 Metode Pengumpulan Data	47
3.7 Alat Pengumpulan Data	48
3.7.1 Validitas Data	48
3.7.2 Reliabilitas Data	49
3.8 Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Kondisi Umum dan Kondisi Geografis	
Kelurahan Siwalan	53
4.1.2 Deskripsi Responden	53
4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	56
4.1.4 Analisis Deskriptif Persentase	57
4.2 Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75

5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Pendanaan BLM TA 2013	8
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Warga Miskin Menurut Kelurahan	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Rentang Persentase	52
Tabel 4.1 Deskripsi Modal Awal Responden	53
Tabel 4.2 Deskripsi Lama Usaha Responden	54
Tabel 4.3 Deskripsi Besar Pinjaman Responden	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	56
Tabel 4.5 Dana Bergulir sudah sesuai diberikan pada waktu sekarang	57
Tabel 4.6 Partisipasi masyarakat dalam membentuk program PNPM-MP	58
Tabel 4.7 Kegiatan Pelatihan Dalam Setahun	59
Tabel 4.8 Pemanfaatan Pinjaman Bergulir	60
Tabel 4.9 Syarat Pinjaman	61
Tabel 4.10 Proses Pengajuan Pinjaman	61
Tabel 4.11 Dana Pinjaman Mencukupi Kebutuhan Modal	62
Tabel 4.12 Keefektifan Program Pinjaman Bergulir	62
Tabel 4.13 Jumlah Tunggakan Dalam Pengembalian Dana	

Pinjaman Bergulir	63
Tabel 4.14 Besarnya Pinjaman Dana Bergulir	64
Tabel 4.15 Pengembalian Angsuran Tiap Bulan	65
Tabel 4.16 Lama Pengembalian Pinjaman	65
Tabel 4.17 Lama Usaha	66
Tabel 4.18 Peningkatan Jumlah Produk Setelah Mendapatkan Pinjaman	67
Tabel 4.19 Kebutuhan Peralatan Setelah Mendapatkan Pinjaman	68
Tabel 4.20 Peningkatan Usaha Setelah Mendapatkan Pinjaman	68
Tabel 4.21 Kelancaran Usaha Setelah Mendapatkan Pinjaman	69
Tabel 4.22 Rangkuman Hasil Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, target penurunan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan sebesar 8,2% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sejalan dengan itulah salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu adalah penghapusan kemiskinan (Bappeda Kota Semarang, 2008).

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga memerlukan

kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin tersebut. Pengalaman lapangan banyak memberikan gambaran bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat sering menimbulkan resistensi tidak saja pada pejabat pelaksana kebijakan tetapi juga sinergi kelembagaan program dengan pemerintah daerah serta kelompok sasaran, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan di masa lalu tapi juga menimbulkan hambatan bagi pembangunan yang akan datang. Nurkse dalam Sukirno (1985:218) mengatakan bahwa terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat : dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal. Dari segi penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut : produktifitas rendah menyebabkan pendapatan masyarakat rendah, pendapatan rendah menyebabkan kemampuan menabung rendah sehingga tingkat pembentukan modal rendah, pembentukan modal yang rendah menyebabkan produktifitas juga rendah. Dari segi permintaan modal, perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas karena pendapatan masyarakat yang rendah.

Meier dan Baldwin dalam Sukirno (1985:219) menyebutkan suatu lingkaran setan kemiskinan lain yang timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan lingkungan alam yang belum dikelola dengan baik. Untuk mengelola potensi kekayaan alamnya, negara harus memiliki tenaga kerja yang ahli dalam memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kekayaan alamnya belum sepenuhnya dikelola dengan baik karena tingkat pendidikan rakyat masih rendah, kurang sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbatasnya mobilitas sumber daya-sumber daya lainnya. Kenyataan membuktikan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin terbatas pengelolaan sumberdaya alamnya, sementara di sisi lain karena pengelolaan sumberdaya alam yang terbatas maka menyebabkan pembangunan masyarakat juga menjadi rendah.

Penanganan masalah kemiskinan juga menjadi kian kompleks karena bangsa Indonesia juga menghadapi adanya persaingan dengan negara-negara lain di dunia. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, harus dilakukan secara komprehensif oleh segenap masyarakat dengan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi/golongan. Diperlukan persatuan dan kemauan (*Goodwill*) semua pihak. Tjokrowinoto (2001:119) mengatakan, banyak faktor yang menentukan kinerja suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi,

mewujudkan pemerataan, dan menanggulangi kemiskinan. Namun salah satu faktor yang paling berperan dalam menentukan kinerja ini adalah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil (*policy choice*) dan strategi yang diterapkan.

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000 : 7) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Pernyataan "*a poor country is poor because it is poor*" sungguh sangat menyedihkan. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa menyebabkan negara menderita kemiskinan.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu (Agus Suman, 2006 : 68) :

1. Menggali potensi kekayaan alam,
2. Meningkatkan produktivitas kerja,
3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung,
4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Memotong lingkaran kemiskinan dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha pernah dilakukan oleh Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian asal Bangladesh. Beliau dikenal sebagai tokoh yang membidangi lahirnya *Grameen Bank* (bank untuk orang miskin). Menurut pandangan beliau, memahami masalah kemiskinan seharusnya dari pihak

yang mengalami masalah. Banyak pihak yang salah persepsi mengenai kemiskinan, yaitu kesejahteraan erat kaitannya dengan keterampilan yang dimilikinya yang diartikan, kesejahteraan hidup tidak bisa terwujud jika seseorang tidak memiliki keterampilan. Atas dasar ini, setiap pemberi dana atau modal tidak akan memberikan pinjaman modal kepada seseorang yang tidak terampil, kecuali orang tersebut diberi pelatihan terlebih dahulu. Konsep ini tidak beralasan, karena yang dibutuhkan oleh orang yang bermasalah adalah modal awal untuk berusaha dan bukan keterampilan. Dia menyakini, masing-masing individu mempunyai keterampilan bawaan sejak lahir. Keterampilan akan muncul dengan sendirinya, melalui adanya modal dan usaha yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan (dalam Muhammad Ali, 2009 : 103).

Dalam konteks ini, program bantuan langsung masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika pendekatan proyek menjadi program dengan melakukan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimulai sejak tahun 1999-2006 yang dimana pada tahun 2007 berganti nama PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang mempunyai peran sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri. PNPM Mandiri

adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Parsudi Suparlan (1984:14-15) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah menghadapi persoalan yang cukup kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2009, jumlah warga miskin di Kota Semarang mencapai 111.558 KK atau 398.009 jiwa. Sedangkan

pada tahun 2011, jumlah warga miskin di Kota Semarang mencapai 128.648 KK atau 448.398 jiwa. Tahun 2013 warga miskin Kota Semarang berjumlah 113.259 KK atau 373.978 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk di Kota Semarang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Kota Semarang telah melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sejak namanya masih P2KP yaitu sejak tahun 1999. Dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang, hanya 10 kecamatan yang menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007. Kecamatan Gayamsari merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang telah melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan sejak awal berdirinya yaitu tahun 2007.

Peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Gayamsari karena kecamatan ini berada di daerah dekat dengan tengah kota dan tergolong daerah yang ramai pemukiman penduduk, tetapi sebagian besar kelurahan/desa tidak didukung dengan infrastruktur jalan dan akses jembatan yang memadai sehingga menyebabkan mereka kesulitan melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Ada 7 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gayamsari yang melaksanakan PNPM-MP yaitu Kelurahan Gayamsari, Kelurahan Pandean Lamper, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan, Kelurahan Sawah Besar, Kelurahan Kaligawe, dan Kelurahan Tambakrejo.

Menurut klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Gayamsari, kelurahan-kelurahan tersebut meskipun sama-sama mendapat bantuan PNPM Mandiri Perkotaan sampai sekarang, namun perkembangan kegiatan program pada kelurahan-kelurahan tersebut berbeda-beda. Berikut adalah pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun Anggaran 2013 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

PENDANAAN BLM TA 2013

No	NAMA_KEC	NAMA KELURAHAN	APBN TAHAP 1	BOP BKM	APBD	APBN TAHAP 2	BOP BKM	JUMLAH
1	GAYAMSARI	PANDEAN LAMPER	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000
2	GAYAMSARI	GAYAMSARI	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000
3	GAYAMSARI	SIWALAN	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000
4	GAYAMSARI	SAMBIREJO	120,000,000	4,500,000	10,000,000	26,250,000	3,000,000	200,000,000
5	GAYAMSARI	SAWAHBESAR	120,000,000	4,500,000	10,000,000	26,250,000	3,000,000	200,000,000
6	GAYAMSARI	KALIGAWA	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000
7	GAYAMSARI	TAMBAKREJO	120,000,000	4,500,000	10,000,000	26,250,000	3,000,000	200,000,000
8	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000
9	SEMARANG TIMUR	BUGANGAN	45,000,000	3,000,000	3,750,000	26,250,000	2,000,000	75,000,000

Sumber : *Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*

Kondisi yang dijelaskan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa alokasi dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) yang diberikan merata di setiap kelurahan. Hal itu karena meskipun ada kelurahan yang mampu melaksanakan program ini dengan baik, tetapi masih terdapat juga kelurahan yang belum bisa melaksanakan program ini dengan baik karena belum mempunya dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat

miskin sebagaimana yang diharapkan sehingga keberdayaan dan kemandirian masyarakat belum dapat ditingkatkan. Berikut adalah data warga miskin Kecamatan Gayamsari pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Data Warga Miskin Menurut Kelurahan
di Kecamatan Gayamsari Tahun 2011 dan 2013

No	Kecamatan	2011		2013	
		KK	Warga	KK	Warga
1	Pandean Lamper	1313	4766	966	3392
2	Gayamsari	736	2771	459	1639
3	Siwalan	458	1724	655	2281
4	Sawah Besar	1068	3792	1452	4826
5	Tambakrejo	1416	4984	1216	4087
6	Sambirejo	1080	4085	738	2249
7	Kaligawe	933	3441	1063	3728
Jumlah		7004	25563	6549	22202

Sumber : *Bappeda Kota Semarang, 2013*

Berdasarkan tabel 1.2, terdapat 3 kelurahan yang mengalami kenaikan jumlah warga miskin dari tahun 2011-2013 yaitu Kelurahan Siwalan sebanyak 557 orang, Kelurahan Sawah Besar sebanyak 1034 orang, dan Kelurahan Kaligawe sebanyak 287 orang. Salah satu kelurahan yang mengalami kenaikan adalah Kelurahan Siwalan. Kelurahan Siwalan dipilih karena akses jalan banyak dilalui masyarakat sekitar karena merupakan jalan pintas antar desa/kelurahan sehingga banyak masyarakat yang memilih melewati kelurahan tersebut. Secara ekonomi, warga di kelurahan tersebut tergolong masyarakat miskin yang masih butuh bantuan dana dan sosialisasi mengenai usaha-usaha yang harus dijalankan.

Dari alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat berupa pinjaman bergulir ini digunakan secara tepat dan berpengaruh pada usaha-usaha yang dijalankan guna menanggulangi masalah kemiskinan di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari.

1.2 Rumusan Masalah

Dana pinjaman bergulir yang diberikan meningkatkan usaha, jumlah produk, dan kelancaran usaha yang akhirnya dapat menurunkan kemiskinan. Namun, data warga miskin di Kelurahan Siwalan tahun 2011-2013 jumlah warga miskinnya malah naik sehingga perlu diteliti kembali apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) mempunyai pengaruh pada variabel-variabel penelitian yang menjadi sasaran program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pada akhirnya nanti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan jumlah produk setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP ?
2. Bagaimana peningkatan usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP ?
3. Bagaimana kelancaran usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui :

1. Peningkatan jumlah produk setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP,
2. Peningkatan usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP,
3. Kelancaran usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman bergulir PNPM-MP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat strategi penanggulangan kemiskinan di kota Semarang,
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan. Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin” (Chriswardani Suryawati, 2005:18).

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi (Widodo, 2006: 296), yaitu :

a. Kemiskinan politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menemukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

b. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan stuktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata

lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Kartasmita (1997: 234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Menurut Arsyad dalam Widodo (2006: 296-297) membedakan kemiskinan menjadi dua yaitu :

- a. Bagian ini berisi tentang kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang jumlahnya terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah
- b. Kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan buatan seperti ini kini populer disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial, sehingga tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan yang dimaksud bukanlah kemiskinan yang dialami seorang individu karena ia malas atau terus-menerus sakit. Kemiskinan yang demikian adalah kemiskinan individual. Sedangkan kemiskinan struktural tersebut dapat disebabkan karena keadaan pemilik sumber yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam pembangunan.

Menurut Sumodiningrat dalam Widodo (2006: 297-298) kemiskinan juga memiliki pola tersendiri baik dari daerah maupun antar individu atau keluarga. Ada beberapa pola kemiskinan antara lain :

- a. *Presistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau lokasi terisolir,
- b. *Cyclical poverty*, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan,
- c. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan
- d. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara.

2.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

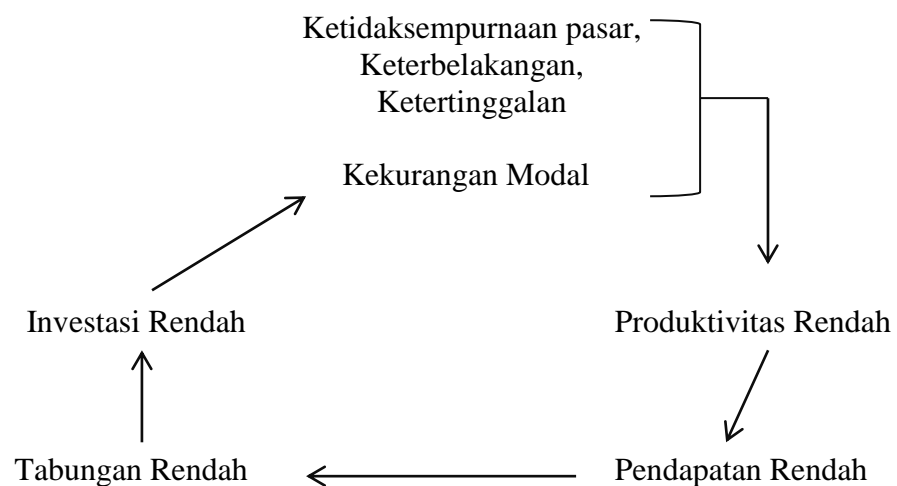
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah,
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah,
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan,

ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000:7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).



Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan (*poverty*) memiliki tanda-tanda sebagai berikut : rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan

ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu,

2. Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar,
3. Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya,
4. Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka,
5. Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

Dari berbagai teori yang ada bahwa kemiskinan itu adalah mereka yang tak mampu memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membutuhkan uluran tangan dan bantuan orang lain mencukupi kebutuhannya.

2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung

karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tidak langsung (Bappenas, 2008).

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus. Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk

miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan penduduk selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

2.4.1 Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini termasuk salah satu program strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

2.4.2 Dasar Hukum PNPM Mandiri Perkotaan

Sebagai salah satu Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2.4.3 Visi dan Misi Mandiri Perkotaan

Menurut Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:1) dijelaskan visi dan misi PNPM Mandiri Perkotaan. Visi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan misi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan.”

Dari visi dan misi tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam upaya pemberdayaan

masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan.

2.4.4 Tujuan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:2) adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri”, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
- c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

2.4.5 Sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan (2008:2) adalah:

- a. Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat
- b. Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan
- c. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

2.5 Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

2.5.1 Latar Belakang dan Tujuan Pinjaman Bergulir

Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat

miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain :

- a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya,
- b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston dan Holloch),

- c. Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan,
- d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi,
- e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Secara umum pinjaman dana bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir 2010:1).

2.5.2 Sasaran, Pendekatan, Prinsip, dan Strategi Pinjaman Bergulir

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

- a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2,
- b. Minimum 30% peminjam adalah perempuan,
- c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang,
- d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil channelling dan kebijakan pinjaman yang jelas.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui :

- a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin,
- b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat,
- c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupuntingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin,
- d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM),
- e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah :

- a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan,

- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan,
- c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya,
- d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM,
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan,
- f. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan,
- g. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai,
- h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain :

- a. Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanjutan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan,
- b. Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap,
- c. Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk,
- d. Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimum yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator kinerja memuaskan dan indikator kinerja minimum,
- e. Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai kriteria minimum, dan menutup UPK yang gagal mencapai kriteria minimum dalam waktu satu tahun setelah penundaan,
- f. Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak,

- g. Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir,
- h. Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya,
- i. LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur pria dan wanita,
- j. LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dasarnya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK,
- k. LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan diluar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KMP,

- l. Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar insentif pegawai dan biaya operasional UPK,
- m. Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain : pengenalan nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, *cash flow* sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang ada,
- n. LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang berfokus pada keberlanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya, yang antara lain terdiri dari : *Cost of Fund* (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan.

2.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dengan harapan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai subjek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Mubyarto, 2000:263).

Sedangkan menurut Sulistiyani (2004:77), pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sulistiyani (2004:80) mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan sama halnya dengan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Gunawan Sumodinigrat (1999:44) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu, upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

2.6.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pada umumnya mempunyai tiga arah yaitu :

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (*pre-poor*),
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat,
- c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

2.6.2 Langkah Pemberdayaan masyarakat

Moeljarto (1993: 34) mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam pemberdayaan masyarakat miskin :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah konkrit adalah meningkatkan kesadaran kritis masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial politik dimana orang miskin itu tinggal,
- b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploif terhadap lapisan orang miskin, artinya membiarkan kesadaran kritis orang miskin muncul untuk melakukan re-organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya,

- c. Menanamkan rasa kebersamaan dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi penjelmaan konstruksi sosial,
- d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh,
- e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin,
- f. Perlunya kontribusi prasarana pembangunan yang lebih merata.

2.7 Evaluasi Program

Evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi (Dunn, 2003:167). Keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Dunn (2003:169), menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Siagian berpendapat (2005:263), evaluasi merupakan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Maka menurut Dunn (2005: 170), evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi ini dapat diketahui

hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir.

2.7.1 Konsep Dasar Evaluasi Program

Menurut Sutisna (2000:252) bahwa : “Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program, sehingga pembinaan program tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah program itu akan diteruskan, ditunda atautkah digagalkan sama sekali. Maka dengan demikian, evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan suatu program. Di samping itu, evaluasi berfungsi pula sebagai suatu usaha untuk: (a) menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program, (b) menemukan faktor penghambat pelaksanaan program, (c) menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan program dan (d) memperoleh bahan untuk penyusunan saran perbaikan, perubahan, penghentian dan penyempurnaan program”.

2.7.2 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan orang untuk berbagai maksud. Perumusan maksud-maksud dengan tegas adalah esensial jika evaluasi program hendak mencapai sarannya yang tepat. Menurut Arief (2000:20) bahwa : “Tujuan pelaksanaan evaluasi program adalah (1)

Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu priode kerja, (2) Untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, (3) Untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak, (4) Untuk memajukan kesanggupan para tutor dan orang tua warga belajar dalam mengembangkan organisasi”.

Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuatu dengan petunjuk teknis/pelaksanaan yang telah ditentukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe evaluasi proses yaitu dengan mendasarkan pada petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis dari program PNPM-MP dalam bidang ekonomi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Dwi Prawani Sri Rejeki (2006) tentang “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000-2003)” dengan menggunakan metode analisis korelasi dan uji beda menunjukkan bahwa faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP, ada hubungan positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha, ada hubungan positif antara pinjaman modal

dengan pendapatan usaha, ada hubungan positif antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha, ada hubungan positif antara pendampingan dengan simpanan usaha, ada hubungan positif antarapinjaman modal dengan simpanan usaha, telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) pendapatan usaha dari rata - rata per bulan, dan telah terjadi peningkatan simpanan usaha dari rata – rata per bulan.

Hasil penelitian Riani Musrifah (2009) tentang “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali” menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap manfaat P2KP dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam P2KP dan pemanfaatan dana P2KP bagi masyarakat sangat bermanfaat. Masyarakat sangat antusias dan berperan aktif dalam program pelaksanaan P2KP khususnya pembentukan BKM dan KSM sebagai wadah penyaluran dana pinjaman agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan pendapatannya.

Tabel 2.1 menunjukkan tabel rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

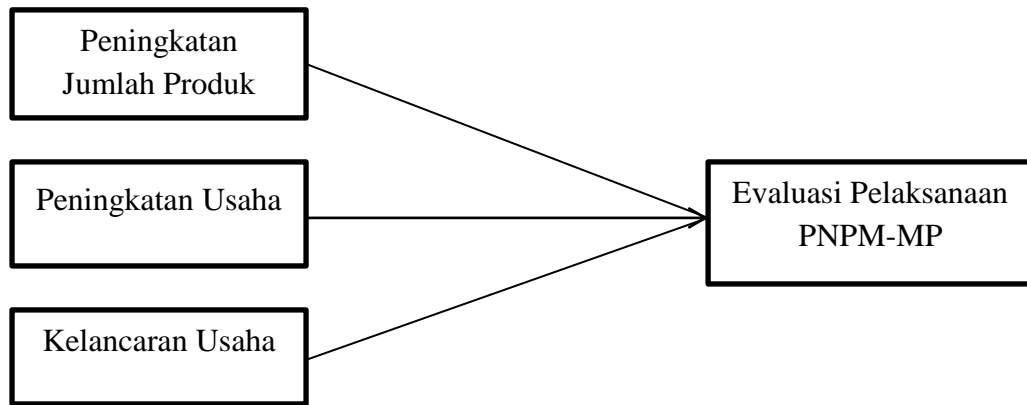
Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1. (Dwi Prawani Sri Rejeki, 2006) Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera. Tahun 2000-2003)	Menganalisis pemanfaatan dana pinjaman dan pendampingan teknis program P2KP di wilayah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan uji beda dengan variabel dependen pendapatan usaha dan simpanan usaha, sedangkan variabel independennya pendampingan dan pinjaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP 2. Ada hubungan positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha 3. Ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha 4. Ada hubungan positif antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha 5. Ada hubungan positif antara pendampingan dengan simpanan usaha 6. Ada hubungan positif antarapinjaman modal dengan simpanan usaha 7. Telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) pendapatan usaha dari rata - rata per bulan 8. Telah terjadi peningkatan simpanan usaha dari rata – rata per bulan
2. (Niken Setyaningsih, 2007) Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinand i Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di	Mendesripsikan dan menganalisis tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil kemiskinan di kelurahan Pudak Payung 2. Implementasi program 	Analisis yang digunakan adalah deskriptif persentase, yaitu membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual,dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil keluarga miskin di kelurahan Pudak Payung menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin bekerja sebagai pedagang dengan tingkat pendidikan tamat SD. 2. Implementasi P2KP di kelurahan Pudak Payung berjalan lancar dengan

<p>Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003-2005),</p>	<p>3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di kelurahan Pudak Payung</p>	<p>akuram mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel.</p>	<p>jumlah KSM semakin bertambah. 3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Pudak Payung yaitu masih adanya sumber daya manusia BKM yang dirasa kurang memadai dan KSM yang bermasalah (kredit macet).</p>
<p>3. (Riani Musrifah, 2009) Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam program P2KP beserta dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya.</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Terdapat 3 komponen dalam teknik ini yaitu Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan/Verifikasi.</p>	<p>1. Persepsi masyarakat terhadap manfaat P2KP dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam P2KP yang meliputi sosialisasi P2KP (masyarakat antusias dan berperan aktif hadir dalam sosialisasi), pembentukan BKM (didukung oleh daftar hadir peserta rebug sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM), pembentukan KSM (banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota KSM), kesadaran dan tingkat kepedulian (rasa keingintahuan masyarakat sangat besar untuk memahami apa itu BKM dan KSM).</p>

			<p>2. Pemanfaatan Dana P2KP bagi Masyarakat dilihat dari pemanfaatan dana untuk ekonomi (perkembangan jenis usaha semakin meningkat sehingga anggota KSM yang memiliki usaha ekonomi produktif meningkatkan pendapatannya).</p>
--	--	--	---

2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan serta berdasarkan kiblat teoritis, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, dimana sasaran akhir dari program adalah menjadikan peserta program untuk dapat mandiri dalam permodalannya sehingga dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Dalam penelitian ini akan membandingkan peningkatan jumlah produk, peningkatan usaha, dan kelancaran usaha sebelum dan sesudah adanya pinjaman bergulir. Apabila ada peningkatan berarti penerima program dapat memanfaatkan bantuan program dengan baik dalam meningkatkan usahanya, sehingga nantinya apabila sudah keluar dari program akan dapat berusaha sendiri. Bantuan program yang diberikan tersebut berupa pinjaman modal kerja bergulir sebagai modal bagi peningkatan pendapatan kegiatan usaha ekonomi produktif. Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian, maka harus didukung dengan berbagai metode yang sesuai dan yang benar secara ilmiah, sehingga kebenaran yang hendak dicapai dapat ditemukan, untuk itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005: 54).

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 54).

Data yang digunakan adalah data kuantitatif (data statistik), yaitu suatu hal yang dinyatakan dalam suatu angka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang

menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data statistik.

3.2 Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Subjek yang akan diteliti adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

3.3 Populasi

Sugiyono (2004 : 149) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Menurut Nazir (2005: 271), populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi *infini*. Atas pemahaman tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah populasi *finit*.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang berjumlah 180 orang.

3.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiyono (2001: 56). Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini tidak seluruhnya menggunakan dana pinjaman bergulir untuk kegiatan ekonomi produktif, maka penelitian ini dilakukan dengan memilih sampel yaitu anggota KSM yang mendapat pinjaman dan masih aktif dalam keanggotaan KSM serta menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), seluruh anggota KSM yang masih aktif masih ikut serta menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode *proporsional area random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-masing bagian terambil sampelnya secara acak. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik *proporsional area random sampling* adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan populasi setiap desa
- b. Menentukan jumlah sampel pada masing-masing desa dengan cara mengalikan jumlah populasi yang ada di setiap desa dengan sampel ukuran
- c. Menentukan sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara menjumlahkan sampel masing-masing desa
- d. Mengambil dari setiap desa yang telah ditentukan sampelnya secara acak.

Penentuan sampel dihitung dengan rumus (Slovin, 1998: 78-79):

$$n = \frac{N}{1+ne^2} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e^2 : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir atau diinginkan. Misal untuk penelitian ini digunakan 10%.

Adapun penghitungan sampelnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+ Ne^2}$$

$$n = \frac{180}{1+ 180(0,10)^2}$$

$$n = \frac{180}{1+1,8}$$

n = 64,28 di bulatkan menjadi 64 sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang berjumlah 64 orang.

3.5 Variabel Penelitian

Untuk memberikan arah menganalisis data diperlukan definisi operasional dari masing – masing variabel penelitian. Variabel adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 2). Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Pinjaman bergulir, yaitu pinjaman modal yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat/BKM),
2. Peningkatan jumlah produk,
3. Peningkatan usaha,
4. Kelancaran usaha.

3.6 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data berupa informasi tentang KSM di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

2. Kuesioner

Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer.

3. Observasi

Observasi yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala fenomena yang ada hubungannya dengan kemiskinan dan kemudian dicatat guna melengkapi data yang diperoleh.

3.7 Alat pengumpulan data

3.7.1 Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan dan kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2002: 144). Analisis yang digunakan untuk mengukur validitas dengan analisis faktor yaitu dikatakan valid apabila hasil korelasi skor faktor dengan analisis faktor total lebih besar dari r tabel dan sebaliknya jika koefisien korelasi tersebut lebih kecil dari r tabel maka instrument untuk faktor tersebut tidak valid, sedangkan taraf signifikan t tabel yang digunakan adalah t tabel yang digunakan

adalah 5% yaitu 0,244. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas adalah korelasi produk moment :

$$R_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- R_{xy} : koefisien korelasi
- N : jumlah koresponden
- $\sum X$: nilai skor butir
- $\sum Y$: nilai skor total
- $\sum X^2$: jumlah kuadrat nilai X
- $\sum Y^2$: jumlah kuadrat nilai Y

3.7.2 Reliabilitas Data

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan instrumen tersebut baik (Arikunto, 2002: 196). Dengan rumus alpha :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum ab^2}{ab^2} \right] \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

- r_{11} : Reliabilitas instrument
- k : banyak butir soal atau pertanyaan
- $\sum ab^2$: jumlah varian butir
- ab^2 : varian total (Arikunto, 2006: 196)

Untuk mencari varian tiap butirnya digunakan rumus :

$$\sigma^2 = \frac{\sum(X)^2 - \frac{\sum(X)^2}{N}}{N} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

σ^2 : varian tiap butir

X : jumlah skor butir

N : jumlah responden

Selanjutnya r_{11} yang diperoleh untuk masing-masing soal dikonsultasikan dengan nilai r tabel untuk derajat α kesalahan 5%. Jika harga r_{11} lebih dari atau sama dengan r tabel, maka item itu valid. Sebaliknya, bila harga r_{11} kurang dari r tabel maka item angket itu tidak valid (Sugiyono, 2001: 282).

3.8 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deksripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 1998: 18). Adapun rumus deskriptif persentase :

$$P\% = \frac{n}{N} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

% : persentase yang diperoleh

n : jumlah skor yang diperoleh dari data

N : jumlah skor ideal (Muhammad Ali, 1992: 182)

Adapun langkah-langkah analisis deskriptif persentase, antara lain :

- a. Memberi nilai di daftar pertanyaan dengan menggunakan skor sebagai berikut :
 1. Jawaban A diberi skor 4
 2. Jawaban B diberi skor 3
 3. Jawaban C diberi skor 2
 4. Jawaban D diberi skor 1
- b. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden
- c. Memasukkan hasil skor kedalam rumus :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

n : skor yang diperoleh

N : skor yang diharapkan

- d. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori :

Persentase tertinggi : $\frac{4}{4} \times 100\% = \mathbf{100\%}$

Persentase terendah : $\frac{1}{4} \times 100\% = \mathbf{25\%}$

Rentang : $100\% - 25\% = \mathbf{75\%}$

Panjang kelas interval : $75\% : 4 = \mathbf{18,75\%}$

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase terendah 25% dapat dibuat kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rentang Persentase	Keterangan
85% - 100%	Sangat tepat sasaran
65% - 84%	Tepat sasaran
45% - 64%	Kurang tepat sasaran
25% - 44%	Tidak tepat sasaran

Sumber : Suryabrata, 1998 : 18

Berdasarkan tabel 3.1, rentang persentase antara 25% - 44% dinilai tidak tepat sasaran, antara 45%-64% dinilai kurang tepat sasaran, antara 65% - 84% dinilai tepat sasaran, dan rentang persentase antara 85% - 100% dinilai sangat tepat sasaran. Rentang persentase tersebut menunjukkan apakah program dana pinjaman bergulir sudah tepat sasaran atau tidak untuk masyarakat miskin di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pinjaman dana bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari menunjukkan bahwa dana pinjaman bergulir yang diberikan pada Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari telah tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan :

1. Terjadi peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Sebelum adanya pinjaman bergulir peningkatan jumlah produksi usaha lebih kecil namun sesudah adanya pinjaman dana bergulir peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM menjadi meningkat. Hal ini berarti peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM lebih besar setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir dibandingkan dengan sebelum adanya pinjaman dana bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi yang semakin meningkat dan kelancaran usaha yang sangat disukai oleh anggota KSM.
2. Terdapat peningkatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Terdapat perbedaan yang cukup besar peningkatan usaha sebelum dan sesudah adanya pinjaman bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan usaha dan kelancaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir. Sebelum adanya pinjaman, usaha yang dilakukan hanya fokus pada

satu macam saja seperti penjual pop ice yang hanya berjualan pop ice saja. Namun, setelah mendapatkan pinjaman bergulir ini, ada peningkatan usaha yang dilakukan seperti penjual pop ice yang menambahkan usahanya berjualan batagor dan siomay.

3. Terdapat kelancaran usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Kelancaran usaha sebelum adanya pinjaman dana bergulir lebih sedikit dibandingkan dengan kelancaran usaha sesudah adanya pinjaman dana bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah peralatan yang dimiliki KSM. Sebelum adanya pinjaman bergulir, usaha yang dijalankan mendapat kendala adanya keuangan karena laba yang diperoleh tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk membeli bahan-bahan. Namun, setelah adanya pinjaman, bahan-bahan yang digunakan untuk usaha mencukupi dan mendapatkan laba yang memuaskan bahkan bisa ditabung walaupun sedikit.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian tentang pinjaman dana bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah hendaknya tetap meningkatkan pembinaan dengan memberikan dana, peralatan dan pelatihan yang lebih baik lagi agar usaha Industri Kecil dan Menengah ini bisa dikelola

dengan lebih baik dan masyarakat akan menjadi lebih mandiri dan terhindar dari kemiskinan.

2. Masyarakat dapat menggunakan dana pinjaman bergulir yang diberikan pemerintah dengan lebih baik dan tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan sendiri atau sifatnya konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala , Andre Bayo. 2001. *Kemiskinan dan strategi memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta : Penerbit Intima.
- Apriyanti, Liyana. 2011. *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*. http://eprints.undip.ac.id/27918/1/SKRIPSI_FULL_TEXT.pdf. (29 Juni 2015)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2000. *Indonesia: Strategi Baru Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : BKPK.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2014. *Semarang Dalam Angka 2014*. Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2013. *Semarang Dalam Angka 2013*. Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2012. *Semarang Dalam Angka 2012*. Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2011. *Semarang Dalam Angka 2011*. Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2014. *Kecamatan Gayamsari Dalam Angka 2014*. Semarang : BPS.
- Bappenas. 2004. *Indonesia : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)*. Jakarta : Bappenas-UNDP.
- Bappenas. 2004. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta : Bappenas.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Musrifah, Riani. 2009. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Surakarta : Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Nazir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Niswonger. 2006. *Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi Kesembilanbelas*. Terjemahan Alfonsus Sirait, Helda Gunawan. Jakarta : Erlangga.
- Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. 2010. <http://www.pnpm.go.id>.(29 Juli 2015).
- Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan. 2008. <http://www.pnpm.go.id>.(29 Juli 2015).
- Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009. RTRW Kota Semarang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Rejeki, Dwi Prawani Sri. 2006. *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000-2003)*. Tesis. Semarang : Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
- Sajogyo. 2000. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan. Dalam Tri Widodo (ed). *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Salim, Emil. 1994. *Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta : Jakarta Press.
- Setyaningsih, Niken. 2007. *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003-2005)*. Tesis. Semarang : Fakultas Ekonomi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sondang P. Siagian. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit PT.Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- _____ 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- _____ 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____ 2000. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : UI-Press.
- _____ 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo.
- Sulistiono, Budi, Dkk. 2010. *Towards Millenium Development Goals (MDGs) Sebentar Lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?.* Bandung : ITB.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sulistiyanti. 2009. *Pendidikan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang.
- Suman, Agus. 2009. *Strategi pembangunan Menuju Indonesia Baru*. Malang : Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, Parsudi (ed). 1984. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Tesis. Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung : Angkasa.
- Suyatno, Thomas. 2001. *Kelembagaan Perbankan. Edisi III*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Tiro, Arif. 2000. *Dasar-dasar Statistika (Edisi revisi)*. Makassar: Makassar State Universty Press.

Tjokrowinoto, Moeljarto, Prof. Dr., MPA. 1993. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*. Yogyakarta : P3PK UGM.

_____ 2002. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

I. IDENTITAS UMUM ANGGOTA BKM “WIJAYA KUSUMA” KELURAHAN SIWALAN

1. Nama responden : L/P
2. Nama KSM :
3. Umur :
4. Alamat rumah :
5. Jenis usaha :
6. Modal awal :
7. Berdiri pada tahun:
8. Pendidikan terakhir:

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini, lengkapilah terlebih dahulu identitas anda,
2. Isilah keterangan yang membubuhkan jawaban tertulis dari anda dengan keadaan yang sebenarnya,
3. Pertanyaan yang mengandung pertanyaan alternatif a, b, c, atau d diisi dengan memberi tanda (X) pada salah satu jawaban yang menurut anda paling benar dan tepat sesuai dengan keadaan anda.

III. PERTANYAAN

A. Pelaksanaan Program PNPM-MP

1. Menurut bapak/ibu, apakah dana bergulir sesuai diberikan pada masa sekarang ini ?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
2. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam membentuk program-program PNPM-MP ?

- a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Kurang aktif
 - d. Tidak aktif
3. Berapa kali dalam setahun bapak/ibu mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak PNPM-MP di Kecamatan Gayamsari ?
- a. > 4 kali
 - b. 3 kali
 - c. 1 kali
 - d. Tidak pernah

B. Program Pinjaman Bergulir

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kebermanfaatan pinjaman bergulir dari PNPM-MP ?
- a. Sangat bermanfaat
 - b. Bermanfaat
 - c. Kurang bermanfaat
 - d. Tidak bermanfaat
5. Menurut bapak/ibu, sulitkah syarat pinjaman untuk dipenuhi ?
- a. Tidak sulit
 - b. Cukup sulit
 - c. Sulit
 - d. Sangat sulit
6. Bagaimana proses mengajukan pinjaman ke PNPM-MP menurut bapak/ibu ?
- a. Sangat cepat
 - b. Cepat
 - c. Lamban
 - d. Sangat lamban
7. Apakah dana pinjaman yang bapak/ibu dapat dari PNPM-MP melalui BKM mencukupi kebutuhan modal usaha bapak/ibu ?

- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
8. Menurut bapak/ibu, efektifkah program pinjaman bergulir dari PNPM-MP ini?
- a. Sangat efektif
 - b. Efektif
 - c. Kurang efektif
 - d. Tidak efektif
9. Berapa kali anda menunggak dalam pengembalian dana pinjaman bergulir ?
- a. Tidak pernah
 - b. 1 kali
 - c. 2 kali
 - d. > 2 kali

C. Proses Pengembalian Pinjaman Bergulir

10. Seberapa besar dana pinjaman dari PNPM-MP melalui BKM yang bapak/ibu peroleh ?
- a. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000
 - b. Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000
 - c. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
 - d. Rp. 250.000 – Rp. 500.000
11. Apakah tiap bulan bapak/ibu selalu dapat mengembalikan angsuran tepat waktu ?
- a. Sangat tepat waktu
 - b. Tepat waktu
 - c. Jarang tepat waktu
 - d. Tidak tepat waktu

12. Berapa lama bapak/ibu mengembalikan pinjaman ini ?

- a. \leq 3 bulan
- b. > 3 bulan - 9 bulan
- c. > 9 bulan – 12 bulan
- d. > 12 bulan

D. Usaha yang dijalankan

13. Sudah berapa lama bapak/ibu menekuni usaha ini ?

- a. > 4 tahun
- b. > 3 tahun – 4 tahun
- c. > 2 tahun – 3 tahun
- d. \leq 1 tahun

14. Setelah mendapatkan pinjaman, apakah jumlah produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha bapak/ibu meningkat ?

- a. Sangat meningkat
- b. Meningkat
- c. Kurang meningkat
- d. Tidak meningkat

15. Setelah mendapatkan pinjaman, apakah kebutuhan penyediaan peralatan untuk usaha bapak/ibu terpenuhi ?

- a. Sangat terpenuhi
- b. Terpenuhi
- c. Kurang terpenuhi
- d. Tidak terpenuhi

E. Bentuk pemanfaatan

16. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya pinjaman bergulir dari PNPM-MP ini dapat meningkatkan usaha bapak/ibu dari sebelumnya ?

- a. Sangat meningkat karena semua dana digunakan untuk tambahan modal
- b. Meningkat karena dana digunakan untuk penambahan modal

- c. Kurang meningkat karena sebagian digunakan untuk modal dan sebagiannya lagi digunakan untuk kebutuhan sendiri
 - d. Tidak meningkat karena tidak meminjam dana tersebut
17. Bagaimana kelancaran usaha bapak/ibu setelah mendapatkan pinjaman dana dari PNPM-MP ?
- a. Sangat lancar (lancar produksi, lancar pemasaran, dan mendapatkan keuntungan yang memadai)
 - b. Lancar (lancar produksi, lancar pemasaran, tapi kurang mendapatkan keuntungan yang memadai)
 - c. Kurang lancar (kurang lancar produksi, kurang lancar pemasaran, dan tidak mendapatkan keuntungan yang memadai)
 - d. Tidak lancar (tidak lancar produksi, tidak lancar pemasaran, dan tidak mendapatkan keuntungan yang memadai).